

**PERAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA  
(GAPI) DALAM MENYELENGGARAKAN  
“INDONESIA BERPARLEMEN”(1939-1942)**



**Didib Putra Chaniago**

**NIM:1403617111**

**Skripsi ini Ditulis untuk Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Didib Putra Chaniago. Peran Gabungan Politik Indonesia dalam penyelenggaraan “Indonesia Berparlemen”(1939-1942). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta ,2022

Penelitian ini membahas tentang Peran Gabungan Politik Indonesia dalam menyelenggarakan Indonesia berparlemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran Gabungan politik Indonesia(GAPI) dalam menyelenggarakan suatu Parlemen yang mayoritas dari masyarakat Indonesia asli (pribumi) sebagai pemegang dan penanggungjawab Parlemen tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik yaitu mencari sumber-sumber sejarah, kritik sumber untuk menemukan keaslian suatu sumber, interpretasi atau penafsiran dan historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap pertama yaitu Heuristik, mengumpulkan beberapa sumber primer berupa koran-koran terbitan tahun 1939 seperti *Pemandangan* dan *PENABOER*, sedangkan sumber sekunder, berupa jurnal-jurnal dan buku buku yang berkaitan dengan pembahasan GAPI tersebut. Tahap kedua verifikasi(kritik sumber) yaitu dengan menguji keasliannya secara intern dan ekstern. Tahap ketiga merupakan interpretasi / penafsiran yaitu mengaitkan dari sumber satu dengan sumber yang lain yang memiliki tema sama. Tahap terakhir adalah Historiografi yaitu menyajikan penelitian ini dalam bentuk deskriptif-naratif. Hasil dari penelitian ini adalah sikap pemerintah Belanda yang selalu menolak pembentukan Parlemen di Indonesia membuat kaum pergerakan melakukan inisiatif sendiri dengan bekerjasama kepada rakyat untuk membentuk suatu Parlemen partikelir atau Parlemen tandingan *Volksraad* yang disebut Majelis Rakyat Indonesia (MRI) sebagai Parlemen ala Indonesia sampai benar- benar Parlemen sesungguhnya terbentuk

**Kata kunci : Gabungan, Politik, Indonesia dan Parlemen**

## **ABSTRACT**

*Didib Putra Chaniago. The role of the Indonesian Political Association in organizing "Indonesian Parliament" (1939-1942). Essay. Jakarta: History Education Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2022*

*This study discusses the role of the Indonesian Political Association in organizing Indonesia as a parliament. The purpose of this study is to explain the role of the Indonesian Political Association (GAPI) in convening a Parliament in which the majority of the Indonesian people are indigenous (indigenous) as the holder and person in charge of the Parliament. Researchers raised this theme because it is very interesting to research and reveal for discussion, it also explains the role of various movements in bringing together political organizations to unite their goals to achieve a parliamentary Indonesia. sources to find the authenticity of a source, interpretation or interpretation and historiography or historical writing. In the first stage, namely Heuristics, collecting several primary sources in the form of 1939 edition newspapers such as Pemandangan and PENABOER, while secondary sources, in the form of journals and books related to the discussion of GAPI. The second stage of verification (source criticism) is to test its authenticity internally and externally. The third stage is interpretation / interpretation, namely linking from one source to another that has the same theme. The last stage is Historiography, which presents this research in a descriptive-narrative form. The result of this research is the attitude of the Dutch government which always refuses the formation of a Parliament in Indonesia, making the movement carry out its own initiative by collaborating with the people to form a private Parliament or a Parliament counter to the Volksraad called the Indonesian People's Assembly (MRI) as an Indonesian-style Parliament until it is truly Parliament is actually formed*






**Keywords: Joint, Politics, Indonesia and Parliament**

## LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  
Penanggungjawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Sarkadi, M.Si  
NIP. 196907041994031002

### TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Abdul Syukur, M.Hum</u> NIP. 196910102005011002 Ketua Penguji		21 Februari 2022.
2.	<u>Dra. Ratu Husniati, M.Hum</u> NIP. 196307071990032002 Sekretaris Penguji		16 Februari 2022
3.	<u>Dr. Nur'aeni Marta, S.S., M.Hum</u> NIP. 197109222001122001 Anggota/Penguji Ahli		16 Februari 2022
4.	<u>Dr. Umasih, M.Hum</u> NIP. 196101211990032001 Anggota/Pembimbing I		21 Februari 2022.
5.	<u>Drs. R. Wisnubroto, M.Pd</u> NIP. 195707111985031005 Anggota/Pembimbing II		21 Februari 2022

Tanggal Lulus: 7 Februari 2022



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Jakarta:

Nama : Didib Putra Chaniago  
NIM : 1403617111  
Prodi : Pendidikan Sejarah  
Judul : Peran Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Dalam  
Menyelenggarakan Indonesia Berparlemen (1939-1942)

Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya pemikiran dan rumusan masalah penulis sendiri. Sepanjang penulisan skripsi ini, penulis mengetahui bahwa skripsi ini belum pernah diajukan untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar akademik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Adapun bagian-bagian tertentu dalam pengutipan karya ilmiah digunakan sebagai sumber penelitian dan dilakukan pengutipan.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya sehingga apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya siap menanggung sanksi akademik yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 21 Februari 2022

  
METELAI  
TEMPEL  
37C8AJX754408036  
Didib Putra Chaniago

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
Telepon/Faksimili 021-4894221  
Laman [lib.unj.ac.id](http://lib.unj.ac.id)

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Didik Putra Chaniago  
NIM : 1903617111  
Fakultas/Prodi : FIS / Pendidikan Sejarah  
Alamat email : didik.putra.so@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul : Peran Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Dalam  
Menyenggarakan "Indonesia Berparlemen" (1939-1992)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta

Penulis

( Didik Putra Chaniago )  
nama dan tanda tangan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan untuk siapapun,  
selama orang tersebut berkeinginan untuk berusaha dan bekerja  
keras untuk memaksimalkan kemampuan yang dia miliki

(Bambang Pamungkas)

Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan  
kegagalan adalah dua loncatan yang paling baik menuju  
kesuksesan (Abraham Lincoln)

Tangga kesuksesan tak pernah penuh dan sesak di bagian  
puncaknya

(Napoleon Hill)

Kami persembahkan penulisan skripsi ini kepada dosen-dosen dan  
mahasiswa pendidikan sejarah UNJ untuk melakukan penelitian lebih lanjut,  
serta kepada masyarakat secara umum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Peran Gabungan Politik Indonesia Dalam Menyelenggarakan “Indonesia Berparlemen” (1939-1942) tepat pada waktunya

Sholawat bersamaan dengan salam juga mari hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, orang tua kita, nenek dan kakek kita, guru-guru dan orang terdekat kita mendapatkan syafa'at Beliau di Yaumul Mahsyar kelak. Amin ya Robbal' Alamin

Penulisan penelitian ini mendapat dukungan, semangat, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Humaidi, M.Hum selaku koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta dan juga kepada Ibu Dr. Umasih. M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi 1 dan Bapak Drs. R.wisnubroto M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi 2, penulis ucapkan terimakasih banyak atas bimbingan, saran, arahan dan nasihat selama penulisan penelitian ini berlangsung. Penulis berterimakasih juga kepada dosen penguji yaitu Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Hum selaku ketua penguji, Ibu Nur'aeni Marta, SS., M. Hum selaku penguji ahli dan Ibu Dra. Ratu Husmiati M.Hum selaku sekretaris penguji. Tidak lupa juga kepada pihak yang sudah membantu dalam penulisan skripsi dari awal hingga selesai. Serta terimakasih juga kepada bapak ibu



dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Erpen Endra dan Ibu Hamida Ernawati yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun material sehingga penelitian ini dapat selesai. Terimakasih juga kepada rekan-rekan temen seperjuangan yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini seperti Abdan Syakur dan Abu Maskur serta teman-teman lainnya yang mohon maaf tidak dituliskan namanya

Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan penelitian ini, dan kami juga mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk bahan pertimbangan perbaikan penelitian ini

Jakarta, Januari 2022



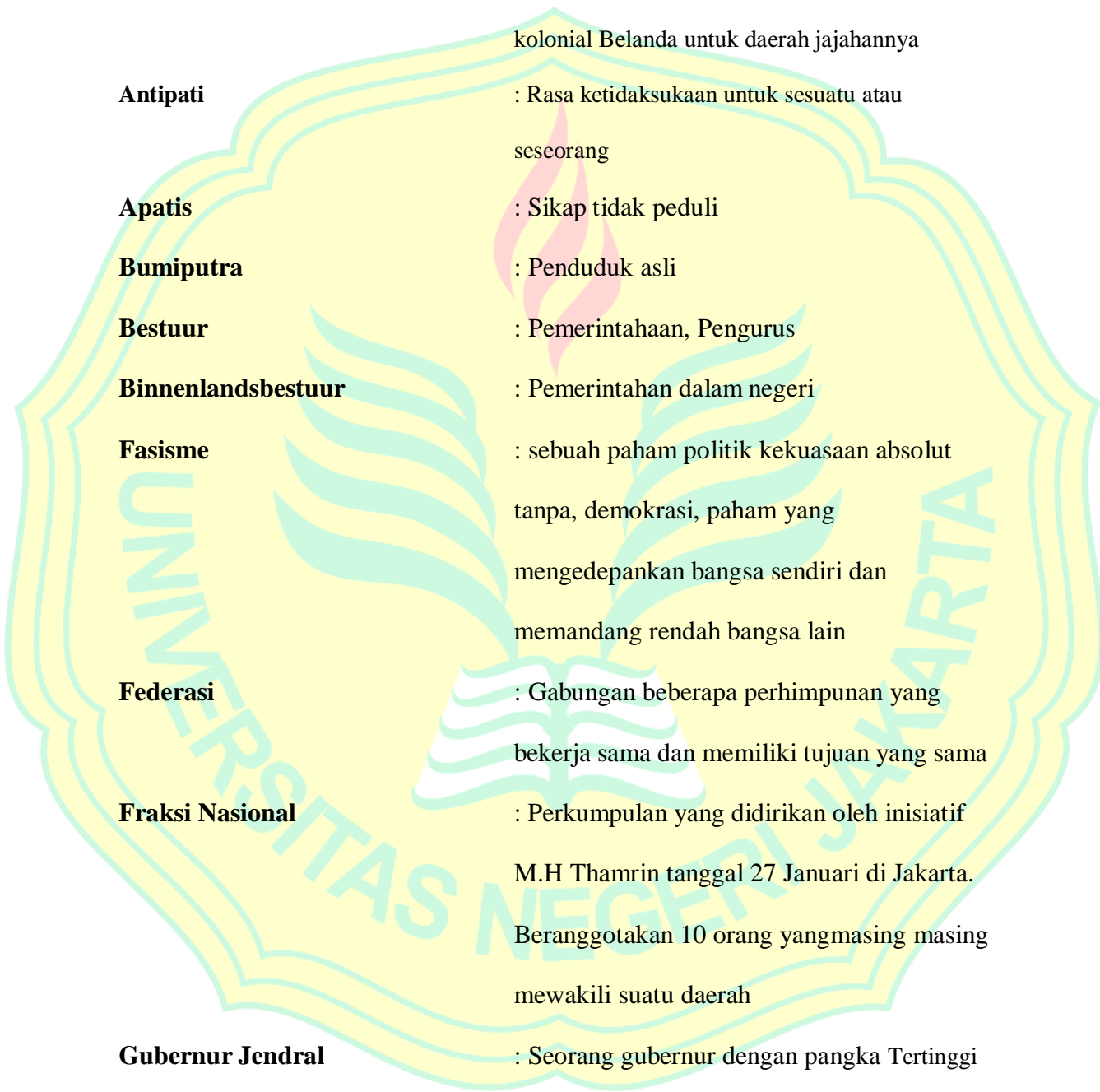
Didib Putra Chaniago

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Metode dan Bahan Sumber .....	16

<b>BAB II LATAR BELAKANG BERDIRINYA GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI) 1939</b> .....	19
A. Terbentuknya Permufakatan Partai PolitikKebangsaan Indonesia (PPPKI) ....	19
B. Berdirinya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) .....	24
<b>BAB III PERKEMBANGAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI) TAHUN 1939-1941</b> .....	35
A. GAPI dengan Semboyan “Indonesia Berparlemen” .....	35
B. GAPI Mengajak Rakyat Indonesia Dalam Program “Indonesia Berparlemen” .....	44
C. Perjuangan GAPI Dalam Menghadapi Tantangan dari Dalam dan Pemerintah Kolonial .....	49
<b>BAB IV MAJELIS RAKYAT INDONESIA (MRI) MENERUSKAN SEMBOYAN INDONESIA BERPARLEMEN</b> .....	58
A. Terbentuknya Majelis Rakyat Indonesia .....	58
B. Perjuangan MRI Dalam Program “Indonesia Berparlemen” .....	62
C. Akhir Dari Perjuangan MRI Dalam Memperjuangkan Indonesia Berparlemen	65
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b> .....	83

## DAFTAR ISTILAH



<b>Aksi</b>	: Gerakan, Tindakan, Sikap
<b>Ambtenaar Pangreh Praja</b>	: Penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk daerah jajahannya
<b>Antipati</b>	: Rasa ketidaksukaan untuk sesuatu atau seseorang
<b>Apatis</b>	: Sikap tidak peduli
<b>Bumiputra</b>	: Penduduk asli
<b>Bestuur</b>	: Pemerintahan, Pengurus
<b>Binnenlandsbestuur</b>	: Pemerintahan dalam negeri
<b>Fasisme</b>	: sebuah paham politik kekuasaan absolut tanpa, demokrasi, paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain
<b>Federasi</b>	: Gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama
<b>Frakasi Nasional</b>	: Perkumpulan yang didirikan oleh inisiatif M.H Thamrin tanggal 27 Januari di Jakarta. Beranggotakan 10 orang yang masing masing mewakili suatu daerah
<b>Gubernur Jendral</b>	: Seorang gubernur dengan pangka Tertinggi pada suatu wilayah
<b>Groeps-gemeen-schappen</b>	: Kelompok-kelompok kedaerahan

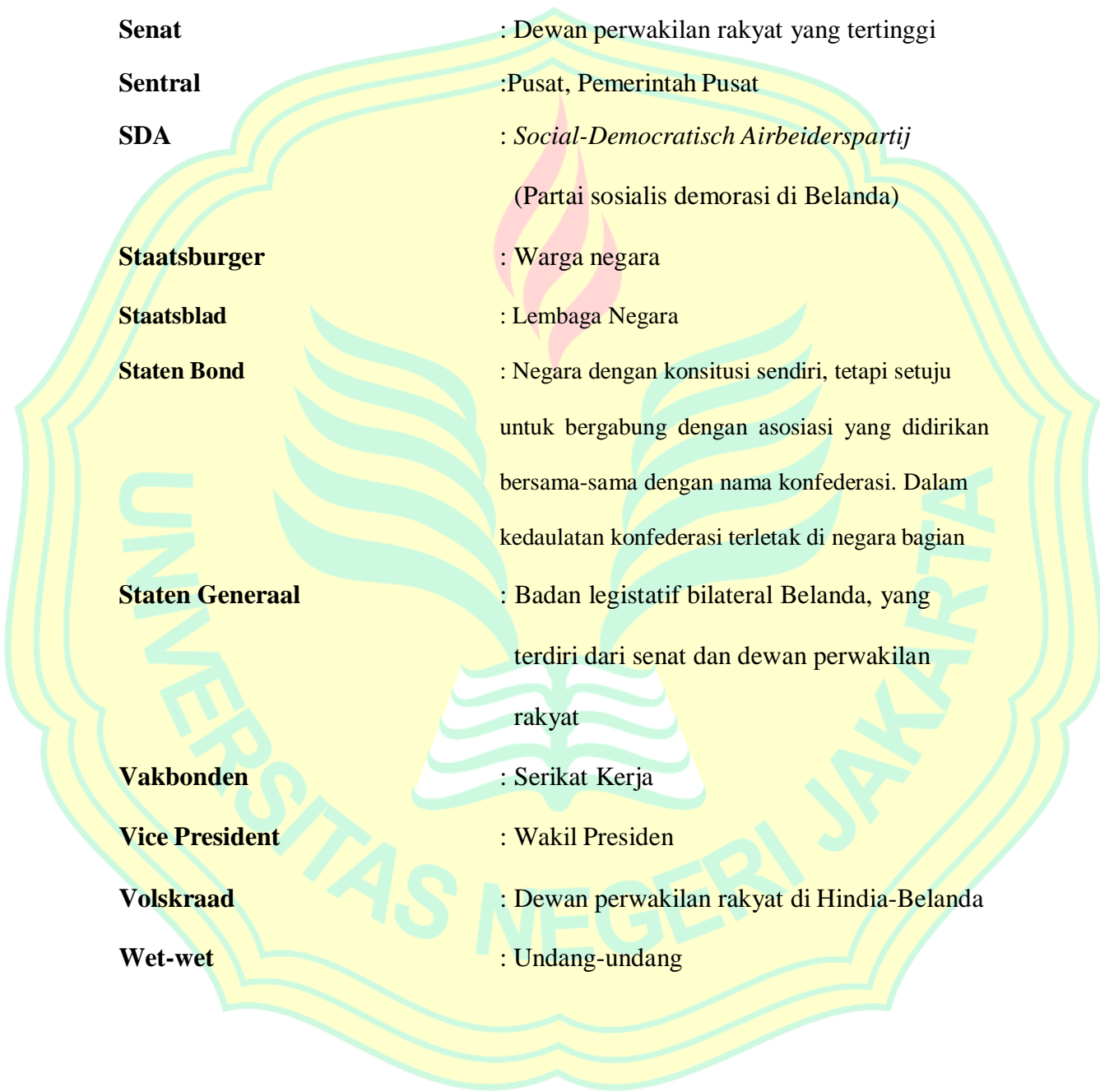
<b>Hak Erfpach</b>	: Hak untuk usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah milik pihak lain
<b>Hak Veto</b>	: Hak untuk membatalkan keputusan, menetapkan merancang peraturan dan undang-undang
<b>Hoofdbestuur</b>	: Pengurus besar atau Kantor Pusat
<b>House of representatives</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat
<b>Indisce Militie</b>	: Milisi Hindia yang merupakan pasukan militer Hindia-Belanda untuk membantu Belanda dalam perang Pasifik
<b>Indische Staatsregeling</b>	: Undang-undang dasar yang mengatur tatanegara dan pemerintahan Hinda-Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti <i>geringsreglement</i> 1854
<b>Indonesier</b>	: Orang Indonesia
<b>Indonesische Midden Groep</b>	: Golongan tengah Indoensia
<b>Inheems</b>	: Penduduk asli
<b>Inlander</b>	: Disebut ejekan untuk penduduk asli di Indonesia oleh orang Belanda pada masa penjajahan Belanda
<b>Istri Indonesia</b>	: Organisasi di era pergerakan nasional Indonesia yang bergerak dibidang perjuangan hak perempuan



<b>Komisi</b>	: Sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas tertentu)
<b>KNIL</b>	: Tentara buatan Belanda untuk mempertahankan keamanan di wilayah Hindia-Belanda
<b>Konfrontatif</b>	: Bermusuhan, cara menentang musuh dengan berhadapan langsung atau terang-terangan
<b>Kongres</b>	: Pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan pengambilan keputusan
<b>Konservatif</b>	: Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku
<b>KUHP Pasal 153 bis tar</b>	: Berisi Undang-undang pidana tentang kejahatan terhadap ketertiban umum
<b>KUHP pasal 161bis tar</b>	: Berisi Undang-undang pidana tentang kejahatan terhadap ketertiban umum
<b>Manifesto</b>	: Pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok
<b>Mosi</b>	: Keputusan rapat, yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggotanya
<b>Nederland-Indie</b>	: Hindia-Belanda
<b>Onschendbaar</b>	: Tidak dapat diganggu gugat
<b>Ordonansi</b>	: Peraturan pemerintah; Peraturan kerajaan
<b>Otonomi</b>	: Kepastian untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat

<b>Paguyuban</b>	: Perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (kedaerahan) untuk membina persatuan (kerukunan) diantara para anggota
<b>Pergerakan Penyedar</b>	: Partai politik yang didiran oleh Agus Salim, A.M. Sangadji dan Mohammad Roem pada 23 Febuari. Pergerakan Penyedar beranggotakan para pengurus yang dipecat dari PSII
<b>Parlemen</b>	: Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang undang peradilan
<b>Parlemen Partikelir</b>	: Parlemen tandingan/Parlemen bukan untuk umum/bukan kepunyaan pemerintah
<b>Perjuangan Kooperatif</b>	: Perjuangan yang bersifat moderat (Lunak) dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah penjajah
<b>Perjuangan non-kooperatif</b>	: Perjuangan yang bersifat radikal dan menolak bekerja sama dengan pemerintah
<b>Pers</b>	: Usaha pengumpulan dan penyiaran berita; Orang yang bergerak dibidang penyiaran berita
<b>Petisi</b>	: Pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah atau meminta agar pemerintah mengambil tindakan

<b>Poenale sentie</b>	: (saksi Hukum), suatu peraturan yang memuat ancaman hukuman terhadap para buruh atau disebut kuli yang tidak menempati kontrak kerja yang telah merekaikuti
<b>Politik Etis</b>	: Suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputra
<b>Prakarsa</b>	: Suatu bentuk inisiatif yang berasal daridalam diri seseorang/kelompok orang, baik dalam bentuk upaya dan ikhtiar (Tindakan) sebagai jawaban atas berbagai tanggapan yang dihadapi
<b>Procereur general</b>	: Jaksa Agung/Penuntut Umum
<b>Propaganda</b>	: Penerangan (paham, pendapat dan sebagainya) yang bener atau salah yang dikembangkan dengan tujuan menghasut suatu aliran,sikap atau arah tindakan tertentu
<b>Provinsialistik</b>	: Paham (gerakan dan sebagainya) yang bersifat kedaerahan
<b>Pribumi</b>	: Penghuni asli, yang berasal daritempat bersangkutan
<b>Raad van Indie</b>	: Dewan Hindia-Belanda
<b>Recarst</b>	: Penyusunan kembali/Perombakan
<b>Resolusi</b>	: Keputusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat



<b>Revisi</b>	: Cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh yang mendasar
<b>Rijksraad</b>	: Dewan Kerajaan
<b>Senat</b>	: Dewan perwakilan rakyat yang tertinggi
<b>Sentral</b>	: Pusat, Pemerintah Pusat
<b>SDA</b>	: <i>Social-Democratisch Arbeiderspartij</i> (Partai sosialis demokrasi di Belanda)
<b>Staatsburger</b>	: Warga negara
<b>Staatsblad</b>	: Lembaga Negara
<b>Staten Bond</b>	: Negara dengan konsitusi sendiri, tetapi setuju untuk bergabung dengan asosiasi yang didirikan bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam kedaulatan konfederasi terletak di negara bagian
<b>Staten Generaal</b>	: Badan legislatif bilateral Belanda, yang terdiri dari senat dan dewan perwakilan rakyat
<b>Vakbonden</b>	: Serikat Kerja
<b>Vice President</b>	: Wakil Presiden
<b>Volskraad</b>	: Dewan perwakilan rakyat di Hindia-Belanda
<b>Wet-wet</b>	: Undang-undang

## DAFTAR SINGKATAN



ART MRI	: Anggaran Rumah Tangga Majelis Rakyat Indonesia
Bapeppi	: Badan Perantara Partai-partai Politik Indonesia
BO	: Budi Outomo
Frani	: Fraksi Nasional Indonesia
GAPI	: Gabungan Politik Indonesia
GBPK MRI	: Garis Besar Program Kerja MRI
Gerindo	: Gerakan Rakyat Indonesia
GNI	: Golongan Nasional Indonesia
IS	: <i>Indische Staatsregeling</i>
KNIL	: <i>Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger</i>
KRI	: Kongres Rakyat Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MRI	: Majelis Rakyat Indonesia
MIAI	: Majelis Islam 'Ala Indonesia
PAI	: Partai Arab Indonesia
Parindra	: Partai Indonesia Raya
PD II	: Perang Dunia II
PHI	: Partai Hindustan Indonesia



PID	: <i>Politieke Inlichtingen Dienst</i>
PII	: Partai Islam Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPBB	: Persatuan Pegawai <i>Bestuur</i> Bumiputra
PPPI	: Persatuan Perkumpulan Pemuda Indonesia
PPPKI	: Permufakatan Partai Politik Kebangsaan Indonesia
PSII	: Partai Serikat Islam Indonesia
PVPN	: Perhimpunan <i>Vakbonden</i> Pegawai Negeri
RR	: <i>Regerings Reglement</i>
SDAP	: <i>Sociaal-Democratische Arbeiders Partij</i>
SI	: Serikat Islam
UUD	: Undang Undang Dasar

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Gedung Volksraad yang terletak di Taman Pejamban 2, Jakarta Pusat.....	82
Lampiran 2: Sidang Volksraad yang sedang memperdebatkan "Petisi Soetardjo"	
83 Lampiran 3: Gedung Permufakatan yang terletak di Jalan Kenari II No.15, Jakarta Pusat .....	84
Lampiran 4: Para pemimpin organisasi yang tergabung dalam Gabungan Politik Indonesia(GAPI).....	85
Lampiran 5: Aksi GAPI menuntut "Indonesia Berparlemen" .....	86
Lampiran 6: Pasukan kolonial belanda sedang melatih kaum Indonesia untuk milisi hindia .....	87
Lampiran 7: Pemimpin MRI.....	88
Lampiran 8: Gedung MRI .....	89
Lampiran 9: Gambar isi dari Petisi Soetardjo yang ditanda tangani oleh Sutardjo, Ratoe Langie, Kasimo, Datoe Toemenggoeng, Ko Kwat Tiong dan Alatas.....	90
Lampiran 10: Gambar koran pemandangan tahun 1939 yang membicarakan program Indonesia Berparlemen.....	91